



Pengaruh Integritas dan Kualitas SDM terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sidoarjo

Muhamad Khalid Abdillah¹, Galih Wahyu Pradana²

^{1,2}Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

Abstract. Good financial management at the village level is crucial to support development and the welfare of the village community. However, many villages still face challenges in financial management, one of which is the low quality of human resources (HR) and the lack of integrity among village officials. This study aims to analyze and evaluate the influence of integrity on village financial management, as well as to analyze and evaluate the influence of human resource quality on village financial management, using 35 village governments in Sidoarjo Regency as the research location. This research was conducted by distributing questionnaires to 232 respondents, with the study population being the entire population of Sidoarjo Regency, totaling 1.977 million people, to examine the independent variables (integrity and HR quality) in relation to the dependent variable (village financial management). The method used in this research is Structural Equation Modeling (SEM), with data processing conducted using Smart-PLS 4 software. The results of the study show that the integrity of village officials has a positive influence on village financial management at a rate of 0.444, meaning that the higher the integrity of village officials, the better the financial management of the village. Additionally, HR quality was also found to have a significant impact on village financial management at a rate of 0.420. This research contributes to improving village financial management by emphasizing the importance of integrity and the quality of human resources in village governance.

Keywords: Human Resource Quality, Integrity, Village Financial Management.

Abstrak. Pengelolaan keuangan yang baik di tingkat desa sangat penting untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, masih banyak desa yang menghadapi tantangan dalam pengelolaan keuangan, salah satunya adalah rendahnya kualitas SDM dan kurangnya integritas di kalangan aparatur desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi pengaruh integritas terhadap pengelolaan keuangan desa, serta menganalisis dan mengevaluasi pengaruh kualitas sumber daya manusia (SDM) terhadap pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan 35 Pemerintah Desa di Kabupaten Sidoarjo sebagai lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner kepada 232 responden dengan populasi penelitian adalah seluruh penduduk Kabupaten Sidoarjo berjumlah 1,977 Juta Orang guna meneliti variabel bebas (integritas dan kualitas SDM) terhadap variabel terikat (pengelolaan keuangan desa). Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah *Structural Equation Modeling* (SEM) dengan pengolahan data menggunakan *software Smart-PLS 4*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integritas aparatur desa memiliki pengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa sebesar 0,444, yang berarti semakin tinggi integritas yang dimiliki oleh aparatur desa, semakin baik pengelolaan keuangan desa yang dilakukan. Selain itu, kualitas SDM juga terbukti berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa sebesar 0,420. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan pengelolaan keuangan desa dengan memperhatikan pentingnya integritas dan kualitas SDM aparat desa.

Kata Kunci: Integritas, Kualitas SDM, Pengelolaan Keuangan Desa.

1. PENDAHULUAN

Di tengah arus globalisasi yang semakin pesat, setiap negara berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas di berbagai sektor kehidupan. Untuk mewujudkan hal ini, tentu negara tidak bisa bergerak sendirian. Negara memerlukan dukungan dari pemerintahan di tingkat lebih rendah, mulai dari pemerintah provinsi hingga ke pemerintah desa. Dalam konteks ini, kebijakan desentralisasi atau pemberian otonomi diberikan oleh pemerintah pusat kepada

pemerintah daerah, sehingga memungkinkan pemerintah daerah untuk mengelola urusan internalnya dengan lebih efisien. Dengan adanya kebijakan ini, pembangunan di setiap daerah dapat berlangsung lebih merata dan memiliki dampak yang lebih signifikan, karena setiap daerah diberikan kewenangan lebih dalam mengelola urusan-urusannya sendiri (Nugroho, 2023). Konsep ini dikenal dengan istilah otonomi daerah.

Otonomi daerah merujuk pada hak, kewenangan, serta tanggung jawab daerah untuk mengatur dan mengelola urusan domestiknya, termasuk ekonomi dan kebijakan publik. Melalui kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan mandat untuk menjalankan fungsi pemerintahan lokal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Desentralisasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom memberikan peluang bagi daerah untuk mengelola urusan pemerintahan, memperbaiki sistem, serta menggali potensi-potensi lokal untuk kesejahteraan masyarakatnya. Daerah, dengan otonomi yang dimiliki, dapat merancang kebijakan lokal yang lebih tepat sasaran dan optimal dalam pemanfaatan sumber daya yang ada (Pepinsky & Wihardja, 2011).

Berlakunya Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 awal era otonomi daerah berkaitan dengan keseimbangan fiskal antara pemerintah federal dan negara bagian serta teritori. Proses pembangunan tersebut menghasilkan pembaruan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan landasan bagi pelaksanaan otonomi daerah. Peraturan Perundang-undangan No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah memberikan kerangka hukum bagi pelaksanaan otonomi daerah, menggantikan undang-undang sebelumnya yang mana kemudian pada tanggal 1 Januari 2001, otonomi daerah ditetapkan. Apa yang terjadi ketika pemerintah pusat memberikan lebih banyak kekuasaan kepada negara bagian dan daerah bergantung pada spesifikasi rencana otonomi daerah. Pemberlakuan otonomi daerah membuka pintu bagi daerah untuk menggali potensi diri dan meningkatkan kinerja perekonomiannya. Otonomi daerah, menurut UU No. 32 Tahun 2004, berupaya memperkuat persatuan dan kesatuan dengan mendorong pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong prakarsa dan keterlibatan aktif masyarakat, serta meningkatkan pemanfaatan potensi daerah secara optimal dan terpadu secara nyata dan bertanggung jawab baik di pemerintahan daerah maupun pemerintahan desa sekalipun.

Desa memiliki kewenangan penuh untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan mereka sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai unit terkecil dalam struktur pemerintahan, desa merupakan garda terdepan dalam menentukan arah

kebijakan untuk mendukung pembangunan nasional (Pradana et al., 2023a). Oleh karena itu, sangat penting untuk memperkuat desa melalui berbagai upaya yang dapat mendukung kemajuan mereka. Pemerintah harus memberikan perhatian serius agar desa menjadi pusat dari pembangunan, baik dalam aspek manusia, infrastruktur, sosial, maupun ekonomi. desa agar dapat menjalankan peran strategisnya dalam pembangunan nasional.

Dana desa yang sumbernya dari APBN dikelola oleh pemerintah desa, yang bertugas sebagai penyelenggara pengelolaan keuangan desa. Di samping itu, cakupan dana yang pemerintah desa kelola di antaranya Dana Transfer Pemerintah (pusat), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Provinsi, dan Pendapatan Asli Desa (PADes). Seluruh keuangan desa didokumentasi dalam bentuk APBDes sesuai dengan kebijakannya. Oleh karenanya, pemerintah desa tidak boleh mengelolanya sesuka hati meskipun kepala desa berotoritas sebagai kuasa pemakai anggaran. Menurut Chabib Sholeh dan Rochmansyah (2010), prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah meliputi akuntabilitas, Transparansi, Pengendalian, *Value for Money*.

Efektivitas pengelolaan keuangan desa harus menjadi tujuan pemerintah desa dalam merealisasikan keuangan desa (Mulyadi, 2019). Dengan pengelolaan keuangan desa yang efektif diharapkan masyarakat desa dapat merasakan dampak yang nyata dari program yang dihasilkan. Tentu hal tersebut juga dapat mendorong desa menjadi desa yang maju dengan pembangunan berkelanjutan sehingga secara tidak langsung akan turut mendorong kemajuan negara. Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari et al., (2023) pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa masih kurang efektif ditunjukkan dengan masih banyak masyarakat yang merasa bahwa keuangan desa tidak digunakan secara baik untuk kepentingan masyarakat banyak.

Korupsi menjadi salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh Indonesia, terutama dalam pengelolaan dana negara yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Berbagai sektor pemerintahan, baik di tingkat pusat, provinsi, hingga desa, tidak luput dari praktik korupsi. Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah pengelolaan dana desa yang seharusnya memberikan manfaat langsung kepada masyarakat di tingkat dasar. Pada tahun 2023, sektor dana desa mencatatkan jumlah kasus yang signifikan, yang mencerminkan betapa pentingnya memperhatikan sistem pengelolaan dana tersebut agar dapat berjalan dengan transparan dan akuntabel. Tabel berikut memberikan gambaran jelas mengenai sektor-sektor dengan jumlah kasus korupsi terbesar, termasuk sektor dana desa, yang perlu mendapatkan perhatian lebih serius dalam upaya pemberantasan korupsi.

Integritas pegawai pemerintahan desa tidak kalah penting dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai pelaksana undang-undang. Integritas adalah suatu komitmen pribadi yang teguh terhadap prinsip ideologi yang etis dan menjadi bagian dari konsep diri yang ditampilkan melalui prilakunya (Schlenker, 2008). Ramadhani dan Hayati (2014) menyimpulkan bahwa integritas memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Resiko kecurangan dapat dicegah dengan adanya sikap integritas aparatur desa, karena integritas berkaitan dengan kejujuran dan tanggungjawab. Apabila aparatur desa memiliki sikap integritas tinggi maka aparat desa tersebut telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan etika.

Disamping itu, kurang terbukanya perangkat desa atas pengelolaan keuangan desa juga menjadi sorotan di tengah masyarakat dewasa ini, teknologi juga ikut berperan yang mana masih sering dijumpai desa yang belum dapat memaksimalkan teknologi yang telah difasilitasi oleh pemerintah pusat dengan tujuan mewujudkan pengelolaan keuangan dana desa yang baik dan dapat meminimalisir kecurangan serta resiko yang tinggi (Fanida et al., 2023). Sehingga untuk mendukung jalannya program desa maka di butuhkan kualitas sumber daya manusia yang mampu melaksanakan tugas terkait dengan pengelolaan dana desa.

Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Arfianti (2011), kualitas sumber daya manusia mengacu pada kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang di bebaskan kepadanya melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang memadai. Sejalan pula dengan penelitian Latif dan Savitri (2021), yang menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini diindikasikan bahwa semakin tinggi kualitas SDM dalam hal ini aparatur sebagai pengelola maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel. Namun, dalam fakta dilapangan kualitas sumber daya manusia masih menjadi masalah dalam pengelolaan keuangan desa.

Kabupaten Sidoarjo, yang terletak di Provinsi Jawa Timur, merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi besar dalam perkembangan ekonomi dan infrastruktur di wilayah ini. Dengan jumlah kecamatan yang mencapai 18, serta 31 kelurahan dan 322 desa, Sidoarjo merupakan wilayah yang sangat dinamis dan memiliki kompleksitas pengelolaan administrasi yang cukup besar. Kabupaten ini juga menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur, dengan berbagai sektor industri, perdagangan, dan pariwisata yang terus berkembang pesat. Selain itu, Sidoarjo juga dikenal dengan keberagaman sosial dan budaya yang menjadi kekayaan daerahnya.

Pada tahun 2023, Kabupaten Sidoarjo menerima dana bantuan yang sangat besar dari berbagai sumber yang dikhususkan untuk seluruh desa di wilayahnya. Dana bantuan tersebut

terdiri dari bantuan BK Desa, Frontage Road, BKK Dana Desa, dan BKK ADD, yang totalnya mencapai ratusan miliar rupiah. Ini merupakan sebuah peluang yang sangat besar bagi pengembangan desa-desa di Sidoarjo, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga pengembangan ekonomi lokal. Namun, besarnya dana yang digelontorkan ini juga menjadi beban yang cukup berat bagi aparat desa, karena mereka diharapkan tidak hanya dapat mengelola dana tersebut dengan baik, tetapi juga memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas yang tinggi.

Namun, meskipun ada potensi besar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Sidoarjo tidak terlepas dari masalah yang cukup serius. Sejak tahun 2020 hingga 2022, sejumlah Kepala Desa di Sidoarjo terjerat kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan anggaran desa. Kasus-kasus ini mengungkapkan adanya celah dalam pengawasan dan pengelolaan dana desa yang memerlukan perhatian lebih. Tercatat selama periode 2020 hingga 2022, ada tiga Kepala Desa aktif dan satu mantan Kepala Desa yang dilaporkan terlibat dalam penyalahgunaan kekuasaan yang berujung pada proses hukum. Fenomena ini memperlihatkan adanya risiko yang tinggi terkait penyalahgunaan dana desa jika tidak ada pengawasan yang ketat dari pemerintah maupun masyarakat setempat.

Data dari Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo menunjukkan peningkatan jumlah aduan terkait pengelolaan keuangan desa yang diterima setiap tahunnya. Pada tahun 2020, Inspektorat menangani 32 aduan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan desa, yang mencakup 41% dari total pengaduan yang ditangani. Angka ini mengalami peningkatan pada tahun 2021 dengan 34 aduan, yang berkontribusi sebesar 48% dari total pengaduan, dan pada tahun 2022 jumlahnya semakin meningkat menjadi 36 aduan atau 58% dari total pengaduan yang diterima hingga batas waktu pengumpulan data pada November 2022. Peningkatan jumlah aduan ini mencerminkan adanya keresahan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa yang tidak transparan dan rentan terhadap penyalahgunaan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya pengawasan dan pengelolaan yang dilakukan, masih banyak celah yang dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan situasi tersebut peneliti tertarik untuk meneliti terkait pengaruh dari Integritas dan Kualitas SDM terhadap pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Sidoarjo. Untuk mengidentifikasi hal tersebut peneliti menggunakan analisa *Structural Equation Modeling* atau biasa disebut SEM. SEM adalah alat analisis yang sering digunakan, yang sebenarnya merupakan gabungan dari analisis faktor, analisis jalur, dan analisis regresi.

Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah integritas dan kualitas SDM, serta variabel terikat dalam penelitian ini adalah pengelolaan keuangan desa dimana kedua variabel tersebut termasuk kedalam variabel laten. Data yang digunakan didapatkan dengan berbagai metode diantaranya studi literatur terkait dengan aspek penelitian, studi observasi pada objek penelitian, serta penyebaran kuisioner kepada Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo.

2. KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Integritas

Secara etimologis, integritas berasal dari bahasa latin integer yang berarti keseluruhan atau lengkap (Fachruddin, 2013). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas adalah kualitas, sifat, atau keadaan yang menunjukkan suatu kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan untuk memancarkan wibawa dan kejujuran. Seorang individu yang memiliki integritas memperlakukan orang lain sebagaimana pribadi tersebut ingin diperlakukan, tetapi tidak mengharapkan timbal balik. Membantu orang lain dilakukan untuk alasan *altruistic* (fokus pada kesejahteraan orang lain), bukan untuk alasan egois (penghargaan pribadi seperti kemajuan karier, pengakuan sosial).

Pengertian Kualitas Sumber Daya Manusia

Menurut Atika dan Mafra (2020), mengemukakan bahwa kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan atas dasar latar belakang keterampilan dan pengalaman untuk membantu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dijalankan agar menunjang perusahaan dapat bersaing. Pendapat lain juga diungkapkan oleh Gerhana et al., (2019), kualitas sumber daya manusia adalah pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan kemauan yang ditunjukkan karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya.

Definisi Dana Desa

Menurut buku saku dana desa yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan 2017 mendefinisikan dana desa sebagai anggaran yang berasal dari APBN yang ditujukan khusus untuk desa dalam rangka untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui dana APBD Kota/Kabupaten. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sementara itu menurut Lili (2018), dana desa ialah dana yang diterima desa setiap tahun yang berasal dari APBN yang sengaja diberikan untuk desa dengan cara mentransfernya langsung lewat APBD Kabupaten/Kota yang dipakai untuk mendanai segala proses penyelenggaraan urusan pemerintahan atau pembangunan desa dan memberdayakan semua masyarakat pedesaan.

3. METODE PENELITIAN

Langkah pendekatan yang digunakan pada penelitian ini merupakan pendekatan yang selaras dengan kebutuhan agar selaras dan menjadikan penelitian lebih konsisten dan terarah (Sugiyono, 2019). Data dikumpulkan melalui alat pengumpulan data yaitu kuesioner. Kuesioner ini diajukan kepada Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo. Adapun lokasi dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah berlokasi di Kabupaten Sidoarjo tepatnya di beberapa pemerintahan desa yang merupakan instansi yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa. Adapun waktu penelitian akan dilakukan selama 2 bulan. Waktu tersebut akan digunakan untuk terjun lapangan dalam pengumpulan data dan pengolahan data.

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh penduduk Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan data dari *website* resmi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, pada tahun 2024 jumlah penduduk di Kabupaten Sidoarjo berjumlah 1,977 juta jiwa. Pengambilan sampel pada penelitian ini memakai metode *non-probability* dengan jenis teknik *purposive sampling* dengan kriteria yakni perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat yang sedikit banyak mengetahui tentang pengelolaan keuangan desa. Teknik tersebut dipilih agar pengambilan sampel dapat dengan tepat dan data yang diperoleh merupakan data yang sebenarnya sesuai dengan kenyataan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Profile Kabupaten Sidoarjo

Kabupaten Sidoarjo adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Secara astronomis, kabupaten ini terletak di antara 7,3°–7,5° Lintang Selatan (LS) dan 112,5°–112,9° Bujur Timur (BT). Secara geografis, Kabupaten Sidoarjo berbatasan dengan Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik di sebelah utara, Kabupaten Pasuruan di sebelah selatan, Selat Madura di sebelah timur, serta Kabupaten Mojokerto di sebelah barat. Dengan luas wilayah sebesar 719,34 km², Kabupaten Sidoarjo terbagi menjadi 18 kecamatan, di mana Kecamatan Jabon merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah mencapai 11,53% dari total luas wilayah kabupaten, diikuti oleh Kecamatan Sedati yang memiliki luas 11,01% terhadap luas wilayah kabupaten. Kabupaten Sidoarjo memiliki total 346 desa/kelurahan, dengan jumlah terbanyak berada di Kecamatan Candi dan Taman, masing-masing dengan 24 desa.

Sejarah Singkat

Sejarah Kabupaten Sidoarjo bermula pada masa pemerintahan Kerajaan Janggala, yang menjadikannya pusat pemerintahan kerajaan tersebut. Pada masa kolonial Hindia Belanda, daerah ini merupakan bagian dari Kabupaten Surabaya yang lebih besar dan dikenal dengan nama Sidokare. Sidokare dipimpin oleh seorang patih bernama R. Ng. Djojohardjo yang tinggal di kampung Pucang Anom. Pada tahun 1859, berdasarkan Keputusan Pemerintah Hindia Belanda No. 9/1859, wilayah Kabupaten Surabaya dibagi menjadi dua, yaitu Kabupaten Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo. Nama Kabupaten Sidokare kemudian diubah menjadi Kabupaten Sidoarjo pada 28 Mei 1859.

Pada masa pendudukan Jepang (1942–1945), Sidoarjo berada di bawah kekuasaan pemerintahan militer Jepang. Setelah Jepang menyerah pada 15 Agustus 1945, Belanda kembali berusaha menduduki daerah ini, yang menyebabkan perpindahan pusat pemerintahan Sidoarjo ke beberapa lokasi, termasuk Porong dan Jombang. Pada tahun 1949, Sidoarjo kembali menjadi bagian dari Republik Indonesia setelah kesepakatan Konferensi Meja Bundar dan penyerahan wilayah Jawa Timur kepada Republik Indonesia Serikat.

Dengan sejarah yang panjang ini, Kabupaten Sidoarjo memiliki banyak peran penting dalam perkembangan wilayah Jawa Timur, baik pada masa kerajaan, kolonialisme, hingga kemerdekaan Indonesia.

Hasil Penelitian

Analisa Deskriptif Variabel dan Indikator Penelitian

Tabel 1. Statistika Deskriptif Variabel Integritas

Variabel Penelitian	Indikator Penelitian	Kode Instrumen Penelitian	Mean	StanDev
Integritas (X1)	Kejujuran (X1.1)	X1.1.1	4,522	0,771
		X1.1.2	4,513	0,782
		X1.1.3	4,513	0,669
	Pengambilan Keputusan Etis (X1.2)	X1.2.1	4,414	0,677
		X1.2.2	4,466	0,724
		X1.2.3	4,366	0,719
	Konsistensi (X1.3)	X1.3.1	4,440	0,763
		X1.3.2	4,483	0,663
		X1.3.3	4,457	0,681
	Tanggung jawab (X1.4)	X1.4.1	4,397	0,712
		X1.4.2	4,427	0,652
		X1.4.3	4,457	0,668

Sumber: Data diolah Peneliti (2025)

Berdasarkan Tabel 1, dapat disimpulkan bahwa tingkat integritas dalam penelitian ini secara keseluruhan dinilai cukup tinggi. Indikator-indikator yang termasuk dalam variabel integritas, seperti kejujuran, pengambilan keputusan, etika, konsistensi, dan tanggung jawab, semuanya memperoleh nilai rata-rata (*mean*) yang tinggi yaitu diatas 4,20 sehingga mendapat predikat “Sangat Baik”.

Kejujuran, dengan indikator X1.1, menunjukkan rata-rata yang sangat tinggi, yakni 4,513 hingga 4,522, yang mencerminkan penilaian positif dari responden mengenai aspek kejujuran. Begitu juga dengan indikator pengambilan keputusan (X1.2), yang memiliki nilai rata-rata antara 4,366 hingga 4,466, meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan dengan kejujuran, tetap menunjukkan tingkat yang baik. Indikator konsistensi (X1.3) memiliki rata-rata yang sedikit lebih tinggi, yaitu antara 4,440 hingga 4,483, dengan standar deviasi yang relatif kecil, menunjukkan adanya konsistensi dalam penilaian responden. Sementara itu, indikator tanggung jawab (X1.4) memperoleh nilai rata-rata antara 4,397 hingga 4,457, yang masih termasuk dalam kategori tinggi. Meskipun ada sedikit variasi dalam penilaian pada beberapa indikator, hasil ini menunjukkan bahwa responden memiliki persepsi yang konsisten dan positif terhadap integritas dalam penelitian ini. Secara keseluruhan, tingkat integritas yang diukur dalam penelitian ini dapat dikatakan sangat baik, dengan penilaian yang cenderung homogen di kalangan responden.

Variabel Kualitas SDM

Tabel 2. Statistika Deskriptif Variabel Kualitas SDM

Variabel Penelitian	Indikator Penelitian	Kode Instrumen Penelitian	Mean	StanDev
Kualitas SDM (X2)	Pengetahuan (X2.1)	X2.1.1	4,435	0,647
		X2.1.2	4,414	0,689
		X2.1.3	4,375	0,732
		X2.1.4	4,448	0,648
	Pengalaman (X2.2)	X2.2.1	4,237	0,701
		X2.2.2	4,392	0,686
		X2.2.3	4,228	0,728
		X2.2.4	4,323	0,697
	Sikap (X2.3)	X2.3.1	4,362	0,730
		X2.3.2	4,474	0,669
		X2.3.3	4,418	0,696
		X2.3.4	4,302	0,785

Sumber: Data diolah Peneliti (2025)

Berdasarkan tabel 2, dapat disimpulkan bahwa kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penelitian ini memiliki penilaian yang cukup baik. Tiga indikator utama yang diukur adalah pengetahuan, pengalaman, dan sikap, dengan masing-masing memperoleh nilai rata-rata yang tinggi yaitu diatas 4,20 sehingga mendapat predikat “Sangat Baik”.

Untuk indikator pengetahuan (X2.1), nilai rata-rata berkisar antara 4,375 hingga 4,448, menunjukkan penilaian positif yang konsisten terhadap tingkat pengetahuan dalam penelitian ini. Begitu pula dengan indikator pengalaman (X2.2), yang memperoleh nilai rata-rata antara 4,228 hingga 4,392, menunjukkan bahwa responden juga menilai pengalaman dalam penelitian ini dengan baik, meskipun ada sedikit perbedaan dalam penilaian. Adapun indikator sikap (X2.3) menunjukkan rata-rata yang sedikit lebih rendah, antara 4.302 hingga 4,474, tetapi tetap berada dalam kategori yang baik.

Secara keseluruhan standar deviasi pada semua indikator relatif kecil, menunjukkan konsistensi penilaian yang baik di antara responden. Hasil ini mencerminkan bahwa kualitas SDM dalam penelitian ini, baik dalam aspek pengetahuan, pengalaman, maupun sikap, cukup baik dan mendapat pengakuan positif dari responden.

Variabel Pengelolaan Keuangan Desa

**Tabel 3. Statistika Deskriptif Variabel Pengelolaan
Keuangan Desa**

Variabel Penelitian	Indikator Penelitian	Kode Instrumen Penelitian	Mean	StanDev
Pengelolaan Keuangan Desa (Y)	Akuntabilitas (Y1.1)	Y1.1.1	4.405	0.688
		Y1.1.2	4.556	0.648
		Y1.1.3	4.427	0.659
	Pengendalian (Y1.2)	Y1.2.1	4.293	0.689
		Y1.2.2	4.220	0.793
		Y1.2.3	4.302	0.659
	Transparansi (Y1.3)	Y1.3.1	4.496	0.695
		Y1.3.2	4.474	0.742
		Y1.3.3	4.513	0.713
	<i>Value for Money</i> (Y1.4)	Y1.4.1	4.448	0.641
		Y1.4.2	4.431	0.666
		Y1.4.3	4.552	0.641

Sumber: Data diolah Peneliti (2025)

Berdasarkan tabel 3, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa dalam penelitian ini dinilai cukup baik oleh responden. Tiga indikator utama yang diukur dalam variabel ini adalah akuntabilitas, pengendalian, dan transparansi, yang semuanya menunjukkan nilai rata-rata yang tinggi yaitu diatas 4,20 sehingga mendapat predikat “Sangat Baik”.

Untuk indikator akuntabilitas (Y1.1), nilai rata-rata berkisar antara 4,405 hingga 4,556, yang menunjukkan bahwa responden memiliki penilaian positif terhadap aspek akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Indikator pengendalian (Y1.2) memperoleh nilai rata-rata antara 4,220 hingga 4,302, meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan dengan akuntabilitas, tetap mencerminkan hasil yang cukup baik. Adapun indikator transparansi (Y1.3) memperoleh nilai rata-rata yang lebih tinggi, yakni antara 4,474 hingga 4,513, yang menunjukkan bahwa aspek transparansi mendapatkan penilaian yang sangat positif. Untuk indikator *value for money* (Y1.4), nilai rata-rata berkisar antara 4,431 hingga 4,552, menunjukkan bahwa responden menilai aspek nilai untuk uang dalam pengelolaan keuangan desa juga sangat baik.

Standar deviasi yang relatif kecil pada semua indikator menunjukkan konsistensi dalam penilaian responden, dengan sebagian besar memberikan penilaian yang seragam. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa dalam penelitian ini dinilai efektif, akuntabel, dan transparan.

Path Coefficient dan Uji Hipotesis**Tabel 4. Hasil Uji Signifikan Menggunakan *Bootstrapping***

	<i>Original Sample (O)</i>	<i>Sample Mean (M)</i>	<i>Standard Deviation (STDEV)</i>	<i>T Statistics (O/STDEV)</i>	<i>P Values</i>
Integritas -> Pengelolaan Keuangan Desa	0.486	0.484	0.065	7.539	0.000
Kualitas Sdm -> Pengelolaan Keuangan Desa	0.473	0.474	0.064	7.361	0.000

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Dari hasil uji signifikansi variabel menggunakan *bootstrapping* seperti disajikan pada Tabel 6 diperoleh hasil bahwa:

- 1) Integritas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa, ditunjukkan dengan nilai *p-value* sebesar 0,000, *T-statistic* sebesar 7,539, dan koefisien jalur sebesar 0,486.
- 2) Kualitas SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa, ditunjukkan dengan nilai *p-value* sebesar 0,000, *T-statistic* sebesar 7,361, dan koefisien jalur sebesar 0,473.

Model Akhir Penelitian

Dari berbagai pengujian yang telah dilakukan pada penelitian ini, akhirnya dihasilkan persamaan model sebagai berikut:

$$Y = 0,486 X_1 + 0,473 X_2$$

Dengan:

Y = Pengelolaan Keuangan Desa

X₁ = Integritas

X₂ = Kualitas SDM

Model akhir dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Integritas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Begitu pula, variabel Kualitas SDM memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat Integritas dan Kualitas SDM, maka semakin baik pengelolaan keuangan desa yang dilakukan.

Hasil Pengujian Hipotesis

Tabel 5. Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Hasil	Kesimpulan
- H0: Integritas tidak berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa - H1: Integritas berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa	$Path\ Coeff = 0,486$ $T-Stat = 7,539$ $P-Value = 0,000$	Integritas berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa
- H1: Kualitas SDM tidak berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa - H2: Kualitas SDM berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa	$Path\ Coeff = 0,473$ $T-Stat = 7,361$ $P-Value = 0,000$	Kualitas SDM berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Penjelasan dari hasil pengujian hipotesis pada tabel 7 adalah sebagai berikut:

a. Hipotesis 1

Integritas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa, ditunjukkan dengan nilai p-value sebesar 0,000, T-statistik sebesar 7,539, dan koefisien jalur sebesar 0,486. Hal tersebut mendukung hipotesis 1, sehingga hipotesis 1 diterima.

b. Hipotesis 2

Kualitas SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa, ditunjukkan dengan nilai p-value sebesar 0,000, T-statistik sebesar 7,361, dan koefisien jalur sebesar 0,473. Hal tersebut mendukung hipotesis 2, sehingga hipotesis 2 diterima.

Pembahasan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Integritas (X_1) dan Kualitas SDM (X_2) terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Y_1). Dalam penelitian ini, variabel Integritas diukur menggunakan komponen yang diusulkan oleh Robbins dan Judge (2023), yang mencakup Kejujuran, Pengambilan keputusan etis, Konsistensi, dan Tanggung jawab. Sedangkan untuk variabel Kualitas SDM (X_2), komponen-komponennya mengacu pada yang dijelaskan oleh Li et al. (2018), yang mencakup berbagai faktor seperti Pengetahuan, Pengalaman kerja, dan Sikap. Adapun variabel Pengelolaan Keuangan Desa (Y_1) mencakup indikator yang dikemukakan oleh Sholeh dan Rochmansyah (2010), yang meliputi Akuntabilitas, Transparansi, Pengendalian, dan *Value for Money*.

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian “**Pengaruh Integritas dan Kualitas SDM terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sidoarjo.**” berjumlah dua

hipotesis, dimana dalam melakukan uji tahapan-tahapan untuk membuktikan hipotesis yang telah dibuktikan sebelumnya, dengan mengumpulkan data dari sumber penelitian terdahulu, akan disimpulkan dan dijadikan referensi guna menentukan langkah yang bisa dilakukan dalam upaya peningkatan Pengelolaan Keuangan Desa melalui Integritas dan Kualitas SDM perangkat desa. Subbab di bawah ini memberikan penjelasan lebih lanjut tentang temuan yang dibahas dalam penelitian ini. Penjelasan lebih lanjut mengenai temuan yang dibahas dalam penelitian ini disampaikan pada subbab berikutnya.

a. Pengaruh Integritas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan hasil pengujian signifikansi path coefficient antara konstruk Integritas dan Pengelolaan Keuangan Desa, diperoleh nilai t-statistics sebesar 7,539 dan p-value sebesar 0,000. Dengan kriteria pengujian menggunakan nilai alpha (α) = 5%, di mana path coefficient dinyatakan signifikan jika t-statistic $\geq 1,96$ dan p-value $\leq 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa integritas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 1 di terima dan H0 di tolak.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan temuan Rachmadi Raka Putra & Muslimin (2024), yang menunjukkan bahwa integritas aparatur desa berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Mereka menekankan bahwa sikap integritas yang tinggi di kalangan aparatur desa dapat mengurangi risiko penyalahgunaan dana desa. Selain itu, penelitian Sutrisno et al. (2023), juga mendukung hasil ini, yang menunjukkan bahwa integritas, transparansi, dan akuntabilitas secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan belanja tidak terduga pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat, di mana integritas dianggap sebagai variabel yang paling dominan mempengaruhi pengelolaan belanja tersebut. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa integritas aparatur desa memainkan peran kunci dalam meningkatkan pengelolaan keuangan desa yang efektif dan transparan. Oleh karena itu, upaya peningkatan integritas di kalangan aparatur desa perlu menjadi prioritas untuk mencapai pengelolaan keuangan desa yang baik.

Variabel Integritas diukur dengan menggunakan 4 (Empat) indikator, yaitu: Kejujuran (X1.1), Pengambilan keputusan etis (X1.2), Konsistensi (X1.3), dan Tanggung jawab (X1.4). Berdasarkan Tabel 1 bahwasannya indikator X.1.1.1 dengan nilai 4,522 merupakan indikator dengan rata-rata nilai tertinggi dan X.1.2.3 dengan nilai rata-rata terendah. Dalam variabel Integritas, indikator dengan nilai outer loading

tertinggi adalah X1.4.3 dengan nilai 0.856, menunjukkan bahwa indikator ini sangat kuat dalam merepresentasikan konstruk Integritas. Sementara itu, indikator dengan nilai outer loading terendah adalah X1.1.1 dengan nilai 0.716. Meskipun nilai ini sedikit lebih rendah dibandingkan dengan indikator lainnya, masih berada di atas ambang batas 0,7 yang menunjukkan validitas konvergen yang memadai.

b. Pengaruh Kualitas SDM terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan hasil pengujian signifikansi path coefficient antara konstruk Kualitas SDM dan Pengelolaan Keuangan Desa, diperoleh nilai *t-statistics* sebesar 7,361 dan *p-value* sebesar 0,000. Dengan menggunakan kriteria nilai $\alpha = 5\%$, *path coefficient* dinyatakan signifikan jika $t\text{-statistic} \geq 1,96$ dan $p\text{-value} \leq 0,05$. Oleh karena itu, hasil analisis ini menunjukkan bahwa Kualitas SDM berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Sehingga Hipotesis 2 pada penelitian ini diterima dan H_0 ditolak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ningrum (2019), yang menemukan bahwa kualitas SDM memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Selain itu, penelitian oleh Lubis et al., (2020), juga menunjukkan bahwa kualitas SDM berpengaruh langsung terhadap sistem pengelolaan dana desa, yang pada gilirannya mempengaruhi kinerja pemerintah desa. Temuan serupa juga dilaporkan oleh Nursin et al. (2022), yang menekankan bahwa kualitas SDM berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan dana desa. Dengan demikian, penelitian ini menambah bukti empiris yang konsisten mengenai pentingnya kualitas SDM dalam meningkatkan pengelolaan keuangan desa.

Variabel Kualitas SDM diukur dengan menggunakan 3 (tiga) indikator, yaitu: Pengetahuan (X1.1), Pengalaman Kerja (X1.2), dan Sikap (X1.3). Berdasarkan Tabel 2 bahwasannya indikator X.2.3.2 dengan nilai 4.474 merupakan indikator dengan rata-rata nilai tertinggi dan X2.3.4 dengan nilai rata-rata terendah yaitu 4,302. Pada variabel Kualitas SDM, indikator X2.1.4 memiliki nilai outer loading tertinggi yaitu 0.845, menunjukkan bahwa indikator ini sangat baik dalam menggambarkan konstruk Kualitas SDM. Di sisi lain, indikator X2.2.4 memiliki nilai outer loading terendah dengan 0.760, namun masih memenuhi standar validitas yang diterima, yaitu lebih dari 0,7.

Implikasi Manajerial

Dari hasil penelitian didapatkan beberapa temuan terkait pengaruh integritas dan kualitas SDM terhadap pengelolaan keuangan desa. Dapat diketahui bahwa variabel Integritas dan Kualitas SDM saling mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya, dari hasil temuan tersebut dapat dirumuskan beberapa implikasi manajerial serta prioritas evaluasi terkait pengelolaan keuangan desa sebagai masukan bagi kepala desa. Adapun masukan bagi evaluasi Pemerintah Desa dapat dilihat pada Tabel 4.16 sebagai suatu jalan keluar bagi permasalahan penelitian ini.

Tabel 5. Implikasi Manajerial

No	Hasil Penelitian	Implikasi Manajerial
1.	Adanya pengaruh integritas terhadap pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Sidoarjo. Hasil pengujian signifikan <i>Path Coeffisient</i> menghasilkan <i>t-statistic</i> sebesar 7,539 dan <i>P-Value</i> 0,000	Kejujuran - Indikator Kejujuran (X1.1) memperoleh rata-rata yang sangat tinggi, yaitu 4,522 dengan standar deviasi 0,771, menunjukkan bahwa perangkat desa perlu terus menjaga kejujuran dalam pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, pelatihan mengenai transparansi dan integritas dalam setiap langkah pengelolaan keuangan harus diberikan untuk mempertahankan tingkat kejujuran yang tinggi. Pengambilan Keputusan Etis - Indikator Pengambilan Keputusan Etis (X1.2), yang memiliki nilai rata-rata antara 4,414 hingga 4,466 dengan standar deviasi antara 0,677 hingga 0,724, mengindikasikan bahwa perangkat desa telah cukup baik dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada prinsip etika. Namun, sangat penting untuk terus mengingatkan perangkat desa agar tetap mengambil keputusan yang mengutamakan kepentingan publik, menghindari konflik kepentingan, serta menjaga moralitas dalam setiap kebijakan yang mereka buat. Konsistensi - Pada indikator Konsistensi (X1.3), dengan nilai rata-rata 4,440 hingga 4,483 dan standar deviasi antara 0,663 hingga 0,763, menunjukkan bahwa konsistensi dalam kebijakan pengelolaan keuangan desa sudah cukup terjaga. Namun, untuk memperkuat hal tersebut, perangkat desa perlu dijamin bahwa pedoman operasional dan kebijakan yang diterapkan bersifat tetap dan jelas, tidak berubah-ubah, sehingga menciptakan pengelolaan yang stabil dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanggung Jawab - Pada indikator Tanggung Jawab (X1.4), yang menunjukkan nilai rata-rata 4,397 hingga 4,457 dengan standar deviasi antara 0,652 hingga 0,712, menekankan bahwa perangkat desa memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam pengelolaan keuangan desa. Untuk itu, penting bagi mereka untuk selalu mengambil keputusan yang tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi juga memastikan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.
2.	Adanya pengaruh Kualitas SDM terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Hasil pengujian signifikan <i>Path Coeffisient</i> menghasilkan	Pengetahuan - indikator Pengetahuan (X2.1) menunjukkan nilai rata-rata antara 4,375 hingga 4,448, dengan standar deviasi antara 0,647 hingga 0,732, yang mencerminkan bahwa perangkat desa sudah memiliki tingkat pengetahuan yang sangat baik dalam pengelolaan keuangan desa. Untuk terus menjaga dan meningkatkan pengetahuan ini, perlu dilakukan pelatihan rutin mengenai regulasi dan prosedur terbaru dalam pengelolaan anggaran desa. Pelatihan ini sangat penting untuk

No	Hasil Penelitian	Implikasi Manajerial
	<i>t-statistic</i> sebesar 7,361 dan <i>P-Value</i> 0,000	memberikan pemahaman yang mendalam tentang peraturan yang berlaku serta memastikan bahwa perangkat desa dapat melaksanakan tugas dengan cermat dan tepat. Pengalaman Kerja - Pada indikator Pengalaman (X2.2), dengan nilai rata-rata 4,228 hingga 4,392 dan standar deviasi antara 0,686 hingga 0,728, dapat disimpulkan bahwa meskipun perangkat desa sudah cukup berpengalaman, pengalaman mereka dalam pengelolaan keuangan desa masih bisa lebih ditingkatkan. Oleh karena itu, penting untuk menyediakan kesempatan bagi perangkat desa untuk mengikuti rotasi jabatan atau penugasan yang lebih beragam agar mereka memperoleh pengalaman yang lebih luas dalam berbagai aspek pengelolaan keuangan. Hal ini akan memberikan mereka keterampilan yang lebih mumpuni dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Sikap - Indikator Sikap (X2.3), dengan rata-rata 4,302 hingga 4,474 dan standar deviasi antara 0,669 hingga 0,785, menunjukkan bahwa perangkat desa sudah memiliki sikap yang baik, proaktif, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas mereka. Namun, untuk memastikan pengelolaan keuangan desa yang lebih efisien dan efektif, sikap tersebut perlu terus didorong dan dipertahankan dengan memberikan penguatan motivasi melalui pelatihan yang berfokus pada sikap profesional, etika kerja, dan tanggung jawab sosial.

Sumber: Hasil Penelitian (2025)

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menggunakan SmartPLS 4 menunjukkan bahwa integritas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Sidoarjo. Integritas aparatur desa memiliki pengaruh sebesar 44,4%, sementara kualitas SDM berkontribusi sebesar 42% terhadap efektivitas pengelolaan keuangan desa. Tingginya tingkat integritas dan kualitas SDM berbanding lurus dengan semakin baiknya pengelolaan keuangan desa.

Namun, penelitian menemukan bahwa ada aspek yang perlu ditingkatkan, yaitu pengambilan keputusan etis, pengalaman perangkat desa, dan pengendalian dalam pengelolaan keuangan desa. Untuk meningkatkan pengambilan keputusan etis, diperlukan pelatihan berkala terkait etika publik dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Peningkatan pengalaman perangkat desa dapat dilakukan melalui pelatihan berkelanjutan di bidang akuntansi pemerintahan dan manajemen anggaran. Sementara itu, pengendalian dalam pengelolaan keuangan desa dapat diperkuat dengan membangun sistem informasi keuangan yang transparan, penerapan audit internal yang lebih ketat, serta pemanfaatan teknologi keuangan untuk memonitor penggunaan anggaran secara real-time.

Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan pengelolaan keuangan desa menjadi lebih akuntabel, transparan, dan efisien, sehingga dapat mencegah penyalahgunaan dana serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfianti, D. (2011). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Batang)*.
- Atika, K., & Mafra, N. U. (2020). Pengaruh kualitas sumber daya manusia dan profesionalisme kerja terhadap kinerja karyawan pada PT PLN (Persero) Pelaksana Pembangkit Bukit Asam Tanjung Enim. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 17(4), 355. <https://doi.org/10.31851/jmwe.v17i4.5098>
- Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2nd ed.). Lawrence Erlbaum Associates.
- Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (2017). *Metode penelitian bisnis* (1st ed.). Salemba Empat.
- Fachruddin, S. (2013). *Pengembangan profesionalitas guru*. Gaung Persada.
- Fanida, E. H., Pradana, G. H., & Puspitasari, Y. (2023). Examining the determinants of village financial management through Siskeudes application: A PLS-SEM approach. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Gerhana, W., Rezi, R., & Wasis, W. (2019). Pengaruh kualitas sumber daya manusia dan profesionalisme terhadap kinerja karyawan dengan komitmen organisasi sebagai variabel intervening (Studi kasus pada karyawan Dinas Pendidikan Hulu Sungai Selatan). *Jurnal Riset Inspirasi Manajemen dan Kewirausahaan*, 3(1), 49–57. <https://doi.org/10.35130/jrimk.v3i1.50>
- Hair, J. F., Jr., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2021). *A primer on partial least squares structural equations modeling (PLS-SEM)*. Sage Publications.
- Lachenbruch, P. A., & Cohen, J. (1989). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). *Journal of the American Statistical Association*, 84(408). <https://doi.org/10.2307/2290095>
- Latif, A., & Savitri, E. (2021). The effect of accountability, transparency, and quality of human resource on village financial management (Empirical study on village government in Solok Regency, West Sumatra). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*.
- Lili, M. (2018). Pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar. *Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA)*.
- Lubis, A., Sari, E. N., Astuty, W., Kunci, K., Sdm, K., Teknologi, P., Pengelolaan, S., Desa, D., & Desa, K. P. (2020). Pengaruh kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi terhadap sistem pengelolaan dana desa serta dampak terhadap kinerja pemerintah desa di Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 107(2).

- Mulyadi, I. (2019). Efektivitas pengelolaan keuangan desa: Studi pada pemerintahan desa di Kota Sawahlunto. *Jispo*, 9(2).
- Ningrum, E. W. (2019). Pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Studi pada desa di lingkup Kecamatan Perak). *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) PGRI Dewantara Jombang*.
- Nugroho, R. (2023). *Public policy* (7th ed.). PT Elex Media Komputindo.
- Nursin, D., Syamsuddin, S., & Nirwana, N. (2022). Pengaruh kualitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern terhadap pengelolaan keuangan dana desa dengan kecerdasan spiritual sebagai variabel moderasi. *Owner*, 7(1), 77–101. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1359>
- Pepinsky, T. B., & Wihardja, M. M. (2011). Decentralization and economic performance in Indonesia. *Journal of East Asian Studies*, 11(3), 337–371. <https://doi.org/10.1017/S1598240800007372>
- Pradana, G. W., Ma'ruf, M. F., Fitrie, R. A., Ratri, W. M. P., & Abdillah, M. K. (2023). Importance-performance analysis on smart village implementation in Tikusan Village, Bojonegoro Regency. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 1811–1822. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-152-4_183
- Puspitasari, R. L., Astuti, D., Ningsih, W. F., & Korespondensi Nama, P. (2023). Pengaruh transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas pemerintah desa terhadap pengelolaan dana anggaran pendapatan dan belanja desa dengan tingkat pendidikan sebagai variabel moderasi di Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi*, 1(1), 121–134.
- Rachmadi Raka Putra, A., & Muslimin. (2024). Pengaruh integritas dan moralitas pada aparatur desa terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana desa (Studi empiris pada desa di Kecamatan Tulangan). *Costing: Journal of Economic, Business and Accounting*.
- Ramadhani, Y., & Hayati, N. (2014). Pengaruh profesionalisme, motivasi, integritas, dan independensi satuan pengawasan internal dalam mencegah kecurangan (fraud) di lingkungan perguruan tinggi negeri. *Jaffa*, 2(2), 101–114. <https://doi.org/10.1521>
- Robbins, S. R., & Judge, T. A. (2023). *Organizational behavior* (19th ed.).
- Schlenker, B. R. (2008). Integrity and character: Implications of principled and expedient ethical ideologies. *Journal of Social and Clinical Psychology*.
- Sholeh, C., & Rochmansyah, H. (2010). *Pengelolaan keuangan dan aset daerah: Sebuah pendekatan struktural menuju tata kelola pemerintahan yang baik*. Fokusmedia.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian bisnis: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Statistika untuk penelitian* (Cetakan ke-30). Alfabeta.

Sutrisno, T., Dm, R., & Khalik, A. (2023). Pengaruh integritas, transparansi, dan akuntabilitas terhadap pengelolaan belanja tidak terduga (BTT) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat. *Jurnal The Manusagre*.

UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah

UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa